



<http://www.lppm.uncen.ac.id/>

ISBN: 978 - 602 - 7905 - 39 - 9

## PROSIDING

SEMINAR HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEKS DAN SAINS  
Edisi Ketujuh, Juli 2021

Diterbitkan Oleh:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Cenderawasih



## POLITIK IDENTITAS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI DI PAPUA

AVELINUS LEFAAN

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih Jayapura

E-mail: [avelefaan11829@gmail.com](mailto:avelefaan11829@gmail.com)

### ABSTRACT

*Papua has received a new status after the New Era government as a special otonomy region from central government. As a consequences, Papua is entering political democracy system, in which before were dominated with otoriterian and militaristic rezime. For almost 20 years after the enactment of special otonomy, the symphons of the increasing of political identity that influence the quality of democracy has emerged. In local democracy political competition, political elite use political identiy as Papua Gunung and Papua Pantai, as tools to gain the power in political moment like in the local election. As the implication, professionalism and the merit system are not growing and its decreasing the quality of democracy. This is the bet of the future of democracy, namely how far the political elite in Papua can reduce the political indentity practices, and then commit to changing to a more rational and professional direction in choosing prospective leaders.*

**Keywords:** *Political identity, Political elite of Papua, democracy*

### PENDAHULUAN

Meskipun di daerah lain, juga terjadi gejala yang sama, tetapi di Papua praktik politik identitas relatif menghadirkan fenomena politik menarik, karena yang terjadi adalah tarik-menarik dua kubu identitas esensialistik di antara warga Papua sendiri, yaitu antara Papua Gunung dan Papua Pantai.

Isu politik identitas lokal tersebut begitu menguat, dan bahkan semakin terpatri dalam struktur mental warga Papua, sehingga setiap kali terjadi momen politik Pilkada kembali menguat. Pada Pilkada serentak 2018 misalnya, isu pertarungan identitas Papua gunung dan pantai kembali mencuat, dan atas dasar itu pula pasangan calon gubernur mempertimbangan konfigurasi politik identitas ini. Kecenderungan ini semakin

menguat, terutama ketika pada Pilihan Gubernur (Pilgub) 2014 dimenangkan oleh Papua gunung.

Dalam perkembangan politik selanjutnya, praktik politik identitas tersebut terus mewarnai dinamika politik di Papua. Tidak terkecuali dalam Pilkada serentak 2018, fenomena praktik politik identitas oleh sejumlah elite dalam upaya memperebutkan kekuasaan terus mengalami penguatan. Sebagai ilustrasi, dalam konfigurasi calon gubernur yang diusung oleh sejumlah partai politik pada Pilgub 2018 menunjukkan konfigurasi dikotomi identitas Papua pantai dan Papua gunung. Pasangan John Wetipo dan Habel Suwae misalnya, Wetipo adalah berasal dari Papua gunung, yaitu bupati Wamena; sedangkan Habel Melkias Suwae adalah berasal dari Papua pantai, seorang mantan bupati Kabupaten Jayapura. Demikian pula pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal di mana Lukas adalah berasal dari Papua gunung, dan Klementinal adalah seorang berasal dari Papua pantai.

Fenomena praktik politik identitas ini tentu memiliki implikasi terhadap kualitas demokrasi jika dilihat secara substansial. Pilkada serentak merupakan manifestasi sistem politik demokrasi yang karena itu proses pemilihan kepemimpinan politik lebih berdasarkan kemampuan profesionalisme dan kapasitas bagi si calon pemimpin. Tesis yang bisa diajukan adalah bahwa sistem demokrasi memberikan peluang seluas-luasnya bagi siapa saja untuk menjadi seorang pemimpin sepanjang memiliki kapasitas untuk itu. Jadi pemimpin terpilih oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi

karena pertimbangan profesionalisme, bukan karena pertimbangan aspek primordialistik seperti etnis, agama, dan ras, atau identitas lain yang melekat secara menetap.

Tulisan singkat ini akan mencoba memberikan penjelasan dan analisis terhadap masih kuatnya praktik politik identitas dalam dinamika politik Papua. Isu ini menarik karena justru marak di tengah upaya membangun sistem politik demokratis, terutama sejak pemberlakuan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Beberapa teori akan digunakan untuk memberikan penjelasan atas makin maraknya politik identitas ini, seperti politik identitas dan etnisitas.

### **Politik Identitas Era Otsus**

Konsep tentang identitas ini, terutama pasca perang dingin memunculkan teori politik identitas yang sedang memperoleh perhatian luas dalam *cultural studies*. Agnes Heller mengambil definisi politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang focus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah kegagalan narasi besar (*grand narrative*), ide perbedaan telah menjanjikan suatu kebebasan (*freedom*), toleransi dan kebebasan bermain (*free play*), meskipun kemudian ancaman baru muncul. Politik perbedaan menjadi suatu nama baru dari politik identitas; rasisme (*race thinking*), biofeminisme, dan perselesihan etnis menduduki tempat terlarang oleh gagasan besar lama. Berbagai bentuk baru

intoleransi, praktik-praktik kekerasan, pun muncul (Heller, 1995: ix).

Klaus Von Beyme (1996) menganalisis perkembangan gerakan politik identitas dalam beberapa tahap, mulai dari tahap pramoderen sampai postmodern. Tahap pertama ialah gerakan politik pramoderen. Perpecahan fundamental, kelompok-kelompok kesukuan, dan kebangsaan memunculkan gerakan sosial yang menyeluruh. Dalam hal ini mobilisasi secara ideologis diprakarsai oleh para pemimpin. Tujuannya adalah perampasan dan perebutan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang baru. Pada tahap modern, gerakan tersebut muncul dengan adanya pendekatan kondisional, keterpecahan membutuhkan sumber-sumber untuk dimobilisasi. Terjadi keseimbangan mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, peran pemimpin tidak lagi dominan dan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan. Kemudian, pada tahap postmodern, munculnya gerakan itu berasal dari dinamikannya sendiri, protes muncul atas berbagai macam kesempatan individual, tidak ada satu kelompok atau pecahan yang dominan. Pola aksi dan kegiatannya berdasarkan kesadaran diri yang bersifat otonomi sebagai tujuan akhirnya (Abdillah, 2002: 17).

Otonomi Khusus (Otsus) oleh berbagai kalangan selama ini dianggap titik kunci penting untuk menetapkan status politik baik bagi pemerintah maupun masyarakat Papua. Sebagaimana diketahui, melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Papua telah diberi kewenangan untuk

mengatur pemerintahan sendiri berdasarkan peraturan perundangan. Dengan Otonomi khusus, pemerintah pusat menghendaki agar gerakan-gerakan separatis dapat segera menghentikan aktivitasnya, dan Papua tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasi lebih lanjut adalah bahwa perdamaian di Papua akan terus terjaga, tanpa ada pergolakan politik yang ingin memerdekakan diri.

Lebih dari itu, proses pembangunan akan dapat semakin lancar dan dapat dipacu secara lebih cepat, karena proses pengambilan keputusan strategis berada di tingkat pemerintah daerah. Otsus juga memberi peluang seluas-luasnya bagi daerah untuk merancang pembangunan sesuai dengan kondisi permasalahan daerah. Lebih dari itu dengan Otsus, kucuran dana pembangunan bukan saja lebih banyak, tetapi dapat tersalur secara lebih lancar baik dari Pusat ke Provinsi maupun dari Provinsi ke berbagai Kabupaten / kota dan daerah terpencil. Berbeda dengan situasi pembangunan pada era Orde Baru, masyarakat Papua tidak lebih dari daerah pinggiran yang sering kali mengalami keterlambatan dalam proses pembangunan. Sentralisasi pengelolaan pembangunan, menyebabkan Papua sering mengalami ketertinggalan dari segala sektor pembangunan.

Akan tetapi, sebegitu jauh adanya Otsus juga membawa dampak serius terhadap semakin menonjolnya praktik politik identitas yang merujuk pada etnosentrisme. Bagi sebagian elite Papua, Otsus diinterpretasikan sebagai

keleluasaan untuk menentukan nasib sendiri atas dasar sentiment etnis. Segenap elite politik di Papua belum lama ini telah menetapkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Papua harus berasal dari warga keturunan Papua asli.

Maraknya praktik politik identitas yang memanfaatkan Otsus pada umumnya berlandaskan etnosentrisme. Pandangan konservatif ini terus mendapatkan dukungan, terutama dari kalangan elite yang menjadikan pengalaman terpinggirkan ketika era Orde Baru. Reaksi negatif dari dominasi pemerintah pusat di era pemerintahan Soeharto, menimbulkan rasa dendam permanen, yang kemudian dimanifestasikan dalam berbagai kebijakan yang berlandaskan sentiment etnis.

### **Etnosentrisme dalam Pilkada**

Fakta penting yang dapat ditemukan dalam dinamika politik lokal pasca Orde Baru adalah, semakin kuatnya konsolidasi kekuasaan elite politik lokal, terutama setelah pimpinan daerah dipilih secara langsung. Akan tetapi implikasi dari dinamika politik lokal seperti itu adalah munculnya faktor etnisitas sebagai faktor penting dalam isu penguasaan pemerintahan lokal (*the issue of government capture*). Studi ini juga menemukan bahwa di Papua menyodorkan fakta politik di mana peran jaringan etnis dalam menentukan kepemimpinan Parpol dan birokrasi pemerintah daerah, ternyata cukup dominan. Gejala pemberian prioritas bagi “putra daerah” untuk menduduki jabatan-jabatan politik di

daerah semakin menguat dan bahkan terlembagakan ketika lahir Perdasus bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, harus berasal dari etnis Papua asli.

Terdapat berbagai argumen yang muncul atas lahirnya pelembagaan putra daerah yang harus memimpin Papua. Dari data dan hasil pengamatan di lapangan setidaknya teridentifikasi tiga alasan utama yang dijadikan dasar keputusan tersebut. Pertama, secara historis Papua bergabung dengan Indonesia tidak sama dengan daerah lain, yaitu baru pada mulai tahun 1963. Dalam posisi seperti itu maka perlakuan pemerintah pusat terhadap Papua juga bersifat khusus, dengan tetap menempatkan daerah ini sebagai daerah yang rentan untuk memisahkan diri. Oleh karena itu wajar jika daerah ini selama lebih dari tigapuluh tahun lebih banyak dipimpin oleh etnis luar Papua. Respons atas perlakuan seperti itu, maka segenap elite Papua memanfaatkan momentum pemberian Otonomi Khusus pasca Orde Baru untuk menunjukkan bahwa putra daerah juga mampu memimpin daerahnya sendiri.

Kedua, perkembangan penduduk asli Papua semakin mengalami penurunan atau setidaknya stagnan, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pendatang. Hingga fase perkembangannya sekarang, penduduk Papua hanya sekitar 3,2 juta jiwa, sementara perkembangan penduduk pendatang semakin cepat seiring dibukanya Papua bagi siapa saja yang merupakan warga Indonesia. Atas dasar fakta seperti itu, jika pimpinan daerah tidak dipegang oleh etnis Papua asli, maka kebijakan politik akan tidak bisa dikontrol

atas kepentingan etnis Papua yang semakin terpinggirkan. Dengan etnis Papua yang berada di pucuk pimpinan maka setidaknya akan ada prioritas bagi upaya pengembangbiakan jumlah penduduk etnis Papua di satu sisi, dan pada sisi lain tekanan penduduk pendatang akan bisa dikontrol dan dibatasi dengan berbagai peraturan.

Ketiga, konsekuensi terbukanya Papua bagi siapa saja, akan meningkatkan kompetisi sosial-ekonomi yang tajam dalam bumi Papua. Situasi seperti itu jelas tidak mungkin etnis Papua akan mampu bersaing dengan penduduk etnis lain dalam berbagai bidang sosial, dan terutama ekonomi. Kecenderungan seperti itu jika tidak dikontrol oleh kebijakan pemerintah, maka etnis Papua akan semakin terpinggirkan dalam dinamika kompetisi sosial-ekonomi. Oleh karena itu pada ranah politik harus dikuasai oleh etnis Papua, sehingga secara politik etnis Papua lah yang akan mengendalikan arah pembangunan Papua ke depan dengan peran utama tetap etnis Papua. Jadi begitulah, Perdasus merupakan produk normatif yang sengaja digunakan untuk mengintervensi dinamika politik lokal agar etnis Papua dapat terlindungi.

Pergulatan politik, terutama dalam kaitannya dengan perebutan kekuasaan melalui Pilkada, nuansa etnisitas ini sangat terasa. Namun yang menarik adalah bahwa etnisitas di sini juga berkaitan dengan teritori, yaitu isu antara orang pantai dan orang gunung. Orang pantai atau juga populer disebut sebagai orang daratan secara umum dianggap lebih terpelajar, lebih terampil, dan bahkan ada yang

mengklaim lebih berperadaban. Sementara itu orang gunung yang tinggal di pedalaman dicitrakan sebagai kurang terpelajar dan masih tradisional. Bagi yang sudah familier dengan Papua, akan dengan mudah membedakan mana orang pantai dan mana orang gunung ketika dilihat dari sisi fisik dan gerak-geriknya. Orang gunung umumnya memiliki fisik rata-rata lebih pendek, berperut agak kedepan, dan ketika berjalan kakinya lebih menekan ke tanah sehingga sepintas terlihat seperti ada tekanan yang kuat. Mereka ini jika berada di wilayah perkotaan perilakunya tampak eksklusif dalam arti kurang memperhatikan sopan santun versi orang perkotaan dan terkesan kurang peduli terhadap aturan. Sering meludah di sembarang tempat dan kurang peduli dengan kebersihan. Citra inilah yang oleh orang Papua daratan dianggap sebagai orang gunung yang tertinggal dan belum pandai.

Di kota Jayapura misalnya, perselisihan yang bersumber dari pencitraan seperti itu sangat terasa di mana orang gunung, atau dalam konteks warga kota Jayapura menyebutnya sebagai orang Wamena, dicitrakan sebagai orang yang tiak pandai, tertinggal, dan gemar menggunakan kekerasan. Bagi warga kota Jayapura atau orang pantai pada umumnya, orang Wamena sering dianggap berperingai temperamental dan suka membuat kerusuhan. Kontestasi kedua etnis itu terasa permanen, sehingga setiap kali ada pemicu atau faktor *casus belli*, maka dengan mudah akan terjadi kerusuhan. Sebagai contoh pada September 2010, terjadi kerusuhan antar

etnis ini hanya gara-gara pertandingan bola voli yang diselenggarakan di Sentani. Turnamen itu mempertandingkan antara klub bola voli Wamena dan salah satu klub dari Kabupaten Jayapura. Oleh karena klub dari Wamena kebetulan kalah, maka para pendukungnya tidak terima dan akhirnya melakukan kerusuhan dengan membakar tempat aparat dan beberapa kendaraan.

Evens atau turnamen bola voli itu sendiri disponsori oleh salah seorang elite, yaitu Klimentinal, yang ingin maju sebagai calon Gubernur. Oleh karena itu, kerusuhan semacam itu dengan mudah merembet ke ranah politik. Klimentinal yang merupakan Bupati Timika, dicitrakan sebagai orang gunung, dan dalam keseharian memang sudah beredar isu bahwa saatnya orang gunung memimpin Papua. Memang, dalam sejarah Papua, belum pernah ada orang Papua pegunungan menjadi Gubernur. Barnabas Suebu misalnya, yang telah menjadi Gubernur Papua selama dua periode, adalah orang Pantai. Oleh karena itu, momen Pilihan Gubernur periode 2011-2015 sarat dengan isu etnis yang berbasis pada teritori, yaitu antara orang pantai dan orang gunung.

Meskipun isu itu oleh kalangan intelektual di Papua dianggap terlalu dipolitisir, tetapi pada kenyataannya dikotomi etnis pantai dan gunung itu sangat terasa dalam dinamika politik Papua menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sebagai indikator tampak pada komposisi Pasangan dari masing-masing yang ingin berkompetisi dalam Pilgub yang diajukan oleh segenap partai

politik. Sebagai contoh misalnya, PDIP dan Partai Gerinda mengusung pasangan John Wempi Wetipo dan Habel Suwae sebagai calon gubernur 2018-2023. Pasangan ini jelas mencerminkan komposisi antara etnis pantai dan etnis gunung. Wetipo adalah seorang berasal dari kalangan gunung di wilayah Wamena yang sekaligus bupati Kabupaten Wamena, sedangkan Habel Suwae adalah asli dari Depapre Kabupaten Jayapura yang merupakan daerah pantai. Habel adalah sosok orang pantai yang dianggap sukses ketika menjadi Bupati Kabupaten Jayapura selama dua periode, populer dengan program pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Wetipo adalah figur orang gunung yang cukup populer di daerah Wamena.

Strategi yang bernuansa etnisitas pantai-gunung itu sekaligus digunakan sebagai respons atas kandidat kuat lain yaitu Lukas Enembe dan Klementinal yang secara sistematis menggarap isu bernuansa etnis, yaitu yargon: “saatnya orang gunung memimpin Papua”. Pasangan yang mempopulerkan diri dengan akronim Lukmen ini diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan sejumlah parpol lainnya. Strategi kemenangan yang berbasis etnis ini sepertinya cukup membawa dampak signifikan, terbukti komposisi jajak pendapat sementara menempatkan pasangan Lukmen berada dalam posisi teratas. Hasil jajak pendapat itu paralel dengan jumlah penduduk Papua yang mayoritas tinggal di daerah pegunungan. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah

orang gunung jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan orang pantai.

Fakta empirik bahwa Papua semakin plural juga mempengaruhi Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura beberapa tahun lalu. Melalui Pilkada dua tahap, akhirnya yang memenangkan adalah pasangan yang mempertimbangkan komposisi etnis, yaitu Pasangan Benhur Tommy Mano dan Nuralam. Benhur adalah orang Papua asli, sedangkan Nuralam adalah tokoh yang berlatar belakang etnis Jawa. Kota Jayapura memang memiliki komposisi penduduk yang relatif berimbang antara etnis Papua asli dan warga pendatang. Fakta demografi politik semacam itu menjadikan peta perebutan pimpinan daerah berbasis pada etnis terasa begitu penting.

Begitulah, isu etnosentrisme itu begitu marak dalam dinamika politik di Papua. Meskipun isu etnisitas ini terasa sensitif dan banyak yang menentanginya, tetapi mau tidak mau tidak bisa dihindarkan. Dalam praktiknya etnis Papua asli sendiri mengalami dilema dan bersifat ambigu ketika realitas berbicara lain, dalam arti bahwa kecenderungan penambahan jumlah warga pendatang semakin signifikan sebagai konsekuensi logis atas dibukanya Papua bagi siapa pun untuk melakukan usaha di tanah Papua. Lebih dari itu, sebagai konsekuensi Papua menjadi bagian dari Indonesia, maka tidak mungkin menolak atau membatasi hadirnya warga Indonesia luar Papua, meskipun secara etnis berbeda. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi segenap

elite Papua untuk memainkan isu etnisitas itu ketika ingin meraih kekuasaan.

Meskipun di berbagai kesempatan warga Papua mengikrarkan adanya persatuan dalam perbedaan etnis, tetapi dalam praktiknya nuansa etnisitas itu tidak dapat hilang begitu saja dalam identitas setiap kelompok masyarakat, terlebih lagi dalam kehidupan politik. Akan tetapi yang menarik adalah bahwa pemahaman terhadap etnik itu sendiri sebegitu jauh memang masih lebih bersifat primordialistik. Apa yang disebut oleh Clifford Geertz sebagai “primordial” merujuk pada anggapan bahwa etnisitas adalah sebuah identitas yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir. Primordial merujuk pada suatu yang askriptif dan melekat pada setiap orang. Meskipun para elite politik berulang kali menegaskan siapa pun yang ada di Papua adalah orang Papua, tetapi pada kenyataannya masing-masing tetap memiliki identitas primordialnya sebagai orang Jawa, orang Bugis, orang Flores, orang Minahasa, orang Maluku dan sebagainya.

Memperhatikan fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa pemahaman etnisitas di Papua memang masih bersifat esensialistik dengan mendasarkan pada ciri-ciri tubuh yang bersifat permanen. Pengertian etnisitas yang dipahami oleh segenap masyarakat Papua belum ada yang menggunakan perspektif konstruktivistik, di mana etnis adalah sebuah konstruksi sosial budaya yang bersifat dinamis, cair, dan diskursif. Bagi sebagian besar warga Papua, etnis tetap menggunakan faktor biologis sebagai basis kategorisasi etnis.

Cara pandang yang esensialistik itu kemudian oleh segenap elite politik di Papua dijadikan sebagai instrumen untuk meraih dukungan massa dalam merebut kekuasaan melalui Pilgub dan juga Pilkada. Bagi calon Gubernur pasangan Lukmen misalnya, perspektif esensialis itu dianggap sebagai sebuah keharusan agar dekotomi etnis orang pantai dan orang gunung adalah permanen. Meskipun dikotomi itu lebih merupakan konstruksi sosial budaya, tetapi pasangan Lukmen mengeksploitasinya demi meraih dukungan suara yang banyak. Oleh karena itu sering terjadi ironi yang ditunjukkan oleh perilaku elite politik di Papua jika berkaitan dengan politik. Di satu sisi mereka menginginkan adanya profesionalisme sebagai dasar bagi pembangunan Papua, tetapi pada sisi lain mereka tetap memelihara hubungan emosional dengan basis tradisionalisme dan primordialisme.

Sikap ambigu semacam itu tidak jarang menimbulkan permasalahan pelik kelak di kemudian hari ketika para elite telah menjalankan roda pemerintahan. Birokrasi pemerintah misalnya, yang mestinya harus bersikap profesional dan netral dari kepentingan politik, tetapi faktanya akan sulit mereka lakukan. Dalam banyak kasus, pelayanan birokrasi akan lebih banyak diwarnai oleh kepentingan politik Bupati atau Gubernur. Di sinilah kemudian muncul faktor etnisitas masuk dalam struktur birokrasi. Sebagai contoh ketika Barnabas Suebu menjabat sebagai Gubernur, maka jajaran pejabat di lingkungan kantor Gubernur didominasi oleh orang-orang yang berasal

dari etnis asal Barnabas. Demikian pula ketika Lucas Enembe menjadi gubernur periode 2013-2018 dari hampir 33 jabatan strategis di jajaran birokrasi Kantor Gubernur lebih dari 70 persen diganti yang berasal dari wilayah Papua gunung.

Demikian pula ketika terpilihnya Walikota Jayapura Benhur Tommi Mano, maka beberapa marga Mano diangkat menjadi kepala kelurahan dan sebagai kepala distrik, serta beberapa warga suku Mano ditempatkan pada posisi yang menentukan dalam pemerintahan Kota Jayapura. Mengapa demikian, karena sudah menjadi semacam kesepakatan sebelumnya (sewaktu kampanye) jika Benhur jadi maka harus memberikan jatah kepada sukunya terlebih dulu untuk ditempatkan pada pos strategis. Oleh karena itu tidak mengherankan jika di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau semacam Dinas, Kepala Dinasnya berasal dari suku yang dipimpin oleh wali kota Benhur Tomy Mano.

Di situlah kemudian muncul permasalahan baru, yaitu bahwa birokrasi tidak mampu bertindak secara profesional karena bias kepentingan elite politik dan bias etnis. Akibatnya birokrasi tidak bisa menghindar dari tarikan untuk mendukung pimpinannya. Di sinilah kemudian birokrasi menjadi instrumen politik dan tidak bisa bertindak profesional dalam menjalankan pelayanan kepada publik, yang mestinya merupakan fungsi utamanya. Sudah menjadi rahasia umum jika di kalangan birokrasi Papua era Otsus bias etnis atau putra daerah. Akan sangat sulit etnis non Papua akan menjadi mendominasi jajaran pejabat eselon tinggi



di kalangan Pemkab atau Pemprov di Papua. tidak seperti ketika era Orde Baru, di mana justru etnis dari luar Papua yang mendominasi jajaran birokrasi.

Etnis gunung dan pantai dieksploitir untuk kepentingan perebutan elite politik dalam Pilkada , tetapi pada kenyataannya mereka hanya diperalat saja. Orang gunung adalah mayoritas, saatnya orang gunung memimpin Papua. orang pantai selama ini telah memimpin tetapi tidak punya perhatian pada orang gunung.

Namun demikian, fakta empirik menunjukkan bahwa penguatan etnisitas dalam Pilkada ini juga kemudian menyodorkan fakta lain. Para pendatang yang semakin banyak ternyata juga mengubah komposisi calon. Oleh karena itu tidak sedikit calon dari Jawa yang dikombinasikan dengan calon etnis lain, karena pertimbangan empiris, bahwa penduduk Jawa memang banyak di Papua.

Begitulah, fakta bahwa dalam Pilkada Papua praktik politik identitas masih marak, maka sedikit banyak berpengaruh terhadap kualitas demokrasi. Jika ke depan memang berupaya meningkatkan kualitas demokrasi politik lokal, maka isu tentang praktik politik identitas yang mengeksploitasi primordialisme perlu segera diakhiri. Boleh jadi itu memang sulit dihindarkan, tetapi bagaimana jika memang sudah berkomitmen pada penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem politik demokrasi memang mau tidak mau harus mengedepankan profesionalisme dalam memilih pemimpin. Inilah pertarungan masa depan demokrasi, yaitu seberapa jauh kita bisa mengurangi praktik politik

identitas, dan kemudian berkomitmen mengganti ke arah yang lebih rasional dan profesional dalam memilih calon pemimpin.

### Daftar Pustaka

- Abdilah, Ubed, 2002, *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang: Indonesatera.
- Barker, Chris, 2000, *Cultural Studies: Theory and Practice*, London: Sage Publications.
- Geertz, Clifford, (1973) dalam bukunya *The Interpretation of Culture*, New York: Glencu